



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 107 TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, diperlukan langkah-langkah operasional dan pedoman yang disusun dalam Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan SPM daerah Provinsi mengoordinasikan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023 – 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM;
- b. menyediakan langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM; dan
- c. memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah direncanakan dalam SPM wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
- (2) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM TAHUN 2023-2027

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (2) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM meliputi:
 - a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. instansi pelaksana.
- (3) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 9 Oktober 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

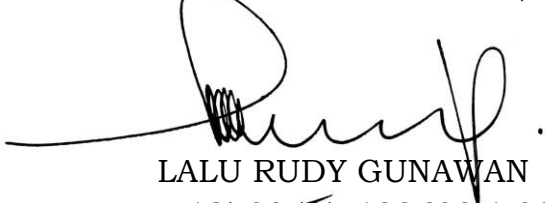
ttd

H. FATHURRAHMAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2027

**RENCANA AKSI DAERAH
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2027**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya, dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023-2027, dapat diselesaikan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM ini. Semoga Renaksi ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI..... 2

DAFTAR TABEL 3

BAB I PENDAHULUAN..... 4

1.1. LATAR BELAKANG4

1.2. LANDASAN HUKUM.....5

1.3. RUANG LINGKUP.....6

1.4. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN.....6

1.5. KONDISI UMUM WILAYAH7

1.5.1. LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH7

1.5.2. TOPOGRAFI7

1.5.3. WILAYAH ADMINISTRASI.....8

1.5.4. DEMOGRAFI.....9

1.5.5. KAWASAN RAWAN BENCANA9

1.5.6. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI14

1.6. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM.....16

BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM 18

2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....18

2.2. PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....29

BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM..... 33

3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI.....33

3.2. MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM.....34

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM 84

4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM84

4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM89

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 91

5.1. KESIMPULAN91

5.2. SARAN91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wilayah Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat 18

Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022..... 18

Tabel 2.2 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022..... 20

Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 22

Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 23

Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 24

Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022..... 25

Tabel 3.1 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023-2027..... 52

Tabel 3.2 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023-2027..... 58

Tabel 3.3 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023-2027 63

Tabel 3.4 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023-2027 67

Tabel 3.5 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023-2027 69

Tabel 3.6 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023-2027 79

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM..... 89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggung jawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, criteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota
14. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 32)

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- 1) Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib.
- 2) Identifikasi program, kegiatan, sub kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM.
- 3) Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar.
- 4) Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM.
- 5) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan.
- 6) Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternative dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM.

1.4. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-

langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.5. Kondisi Umum Wilayah

1.5.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Berdasarkan pada posisi geografis, Provinsi NTB terletak antara 08° 10' - 09° 05' Lintang Selatan dan 115° 46' – 119° 05' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
- Sebelah Timur : Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km², terdiri dari daratan (20.124,48 Km² atau 40,81%) dan perairan laut (29.159,04 Km² atau 59,19%) dengan panjang garis pantai sekitar 2.332,80 Km.

Provinsi NTB memiliki 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta dikelilingi oleh 401 pulau-pulau kecil (*KEPMENDAGRI No. 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021*). Pulau Lombok memiliki luas 4.699,83 Km² atau 23,35%, sedangkan Pulau Sumbawa 15.424,65 Km² atau 76,65%..

1.5.2. Topografi

Kondisi topografi wilayah Provinsi NTB bervariasi dari 0 s.d 3.726 meter dpl untuk Pulau Lombok, dan 0 s.d 2.755 meter dpl untuk Pulau Sumbawa. Berdasarkan ketinggian wilayah tersebut, fisiografi Provinsi NTB dapat diklasifikasikan datar, landai, perbukitan dan pegunungan. Di Pulau Lombok terdapat jajaran gunung seperti Gunung Rinjani, Mareje, Timanuk, Nangi,

Perigi, Plawangan, dan Gunung Baru. Sedangkan di Pulau Sumbawa terdapat Gunung Batu Lanteh, Tukan, Jaran Pusang, Soromandi/Donggo, Tambora, Dadu, Pajo dan Gunung Sambi.

Bila ditinjau dari klasifikasi ketinggian wilayah, maka wilayah yang memiliki ketinggian 0 s.d 100 mdpl sekitar 478,911 Ha; ketinggian 100 s.d 500 mdpl sekitar 753,612 Ha; ketinggian 500 s.d 1.000 mdpl sekitar 307,259 Ha; dan 1.000 mdpl ke atas sekitar 475,533 Ha.

Kemiringan tanah di wilayah Provinsi NTB didominasi oleh kemiringan tanah antara 15% s.d 40% seluas 704.619 Ha (34,96%), sedangkan klasifikasi kemiringan tanah hingga 2% seluas 338.552 Ha (16,80%). Di Pulau Lombok klasifikasi kemiringan antara 2% s.d 15% seluas 198.616 Ha (9,85%) sedangkan klasifikasi kemiringan tanah lebih dari 40% seluas 20.175 Ha (1,01%). Adapun di Pulau Sumbawa klasifikasi kemiringan tanah antara 15% s.d 40% seluas 573.903 Ha (28,48%) dan kemiringan tanah hingga 2% seluas 214.194 Ha (10,63%).

1.5.3. Wilayah Administrasi

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, 117 kecamatan dan 1.153 desa/kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1.1 Wilayah Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELUARAHAHAN	KET.
1	2	3	4	6
1.	LOMBOK BARAT	10	122	
2.	LOMBOK UTARA	5	43	
3.	NUSA TENGGARA BARAT	12	139	Tambahan 15 Desa Definitif Tahun 2022
4.	LOMBOK TIMUR	21	254	
5.	SUMBAWA BARAT	8	65	Tambahan 1 Desa Definitif Tahun 2022
6.	SUMBAWA	24	166	
7.	DOMPU	8	81	
8.	BIMA	18	192	
9.	KOTA MATARAM	6	50	
10.	KOTA BIMA	5	41	
		117	1.153	1.169 Desa

1.5.4. Demografi

Menurut Data Penduduk Provinsi NTB pada tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus 2015) berjumlah 5.298.471 jiwa, laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 1,39 % sedangkan tahun 2020 sebesar 1,43 %. Dilihat dari sebaran dan laju pertumbuhan penduduk, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki jumlah penduduk paling kecil yakni 159.980 jiwa tetapi laju pertumbuhannya tertinggi sebesar 2,91 %.

Sementara, Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar mencapai 1.244.181 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,97 %. Laju pertumbuhan penduduk di pulau Lombok lebih kecil dari Pulau Sumbawa yaitu 1,32 % sementara Pulau Sumbawa 1,54 %. Adapun faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah penduduk tersebut karena adanya kelahiran alamiah dan migrasi penduduk.

Penyebaran penduduk di Provinsi NTB tidak merata karena berdasarkan pada distribusi penduduk menurut wilayah, pada tahun 2021, sebanyak 70 % penduduk tinggal di Pulau Lombok dan sisanya 30 % mendiami Pulau Sumbawa sehingga berimplikasi pada tingginya ketimpangan kepadatan penduduk di antara kedua pulau tersebut.

1.5.5. Kawasan Rawan Bencana

1. Bencana Alam Tanah Longsor

Potensi bencana longsor di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diakibatkan oleh kondisi alam yaitu intensitas curah hujan, kemiringan lereng dan jenis tanah dengan klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor, yaitu kawasan dengan potensi tinggi untuk mengalami gerakan tanah dan cukup padat permukimannya, atau terpadat konstruksi bangunan sangat penting, pada lokasi seperti ini sering mengalami gerakan tanah (longsoran), terutama pada musim hujan atau saat gempa bumi terjadi. Kawasan tingkat kerawanan sedang adalah kawasan yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah, namun tidak ada permukiman. Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah adalah potensi gerakan tanah yang tinggi, namun tidak ada resiko terjadinya korban jiwa terhadap manusia dan bangunan.

Potensi luas bahaya tanah longsor merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki kondisi

rentan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Nusa Tenggara Barat ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Nusa Tenggara Barat ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor. Potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan adalah 1.155.618 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 62.432 Ha, kelas sedang seluas 466.054 Ha, dan kelas tinggi seluas 627.131 Ha.

2. Bencana Alam Banjir

Beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah rawan bencana banjir. Banjir sebagai fenomena alam terkait dengan manusia terjadi sebagai akibat aktualisasi beberapa factor yaitu: hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu, kondisi daerah budidaya dan pasang surut air laut. Potensi terjadinya ancaman bencana banjir dan tanah longsor saat ini disebabkan keadaan badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata-ruang wilayah, perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah. Selain faktor-faktor tersebut di atas, banjir juga kerap terjadi Karena sifat alami wilayahnya, seperti bentuk dan luas daerah aliran sungai yang terpadu dengan curah hujan yang tinggi.

Luas bahaya Provinsi Nusa Tenggara Barat ditentukan berdasarkan total luas bahaya banjir kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdampak bahaya banjir. Kelas bahaya banjir Provinsi Nusa Tenggara Barat ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdampak banjir. Total luas bahaya banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan adalah 154.849 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 1.823 Ha, kelas sedang seluas 93.206 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 59.820 Ha.

3. Bencana Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Berdasarkan hasil analisis gelombang pasang deliniasi daerah gelombang pasang menggunakan jarak terjauh yakni daerah terpengaruh gelombang, dengan jarak yang digunakan adalah 1 km dari garis pantai. Keberadaan mangrove mempengaruhi besarnya potensi resiko terhadap bahaya gelombang pasang. Dengan adanya keberadaan hutan mangrove primer maupun sekunder dapat meminimalisir gelombang pasang yang terjadi. Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai gelombang pasang tertinggi yaitu 3 - 4 meter dari garis pantai dan masuk dalam tingkat rawan bagi masyarakat yang bermukim pada wilayah pesisir. Namun hutan mangrove primer dan sekunder menjadi salah satu bagian yang mampu mengurangi tinggi gelombang pasang, sehingga kawasan hutan mangrove memiliki potensi untuk dilindungi karena mampu mengurangi tingginya gelombang pasang.

Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 43.322 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 24.309 Ha, pada kelas sedang seluas 3.675 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 15.338 Ha

4. Bencana Alam Gempabumi

Kebanyakan gempabumi disebabkan dari suatu tegangan pada lempengan yang bergerak kemudian melepaskan energi. Indonesia secara geologis terletak pada 3 (tiga) lempeng yakni Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik mempunyai dinamika geologis yang sangat dinamis yang mengakibatkan potensi bencana gempa. Proses tumbukan antar lempeng yang memiliki sisa energy akan mengakibatkan adanya sesar atau patahan baik di daratan dan dilautan.

Penyebaran patahan yang hampir merata di wilayah kepulauan Indonesia tentunya juga menjadi potensi tinggi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kejadian gempa juga telah

berdampak cukup besar pernah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat setidaknya tercatat 4 gempa besar di tahun 1979, 2004, 2013, dan 2018. Penyebab utama permasalahan gempabumi di wilayah Lombok khususnya karena tersusun oleh endapan kuarter berupa dominan batuan rombakan gunung api muda yang telah mengalami pelapukan. Batuan rombakan gunung api muda ini telah mengalami pelapukan pada umumnya bersifat urai, lepas, belum kompak, memperkuat efek guncangan atau amplifikasi, sehingga rawan terhadap guncangan gempabumi.

Luas bahaya Provinsi Nusa Tenggara Barat ditentukan berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota. Sedangkan kelas bahaya gempabumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdampak bahaya gempabumi. Dari hasil analisis, total luas bahaya gempabumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan adalah seluas 1.857.232 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas 678.961 Ha, pada kelas sedang seluas 776.344 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya gempabumi pada kelas tinggi seluas 401.927 Ha.

5. Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Peraturan Menteri Kehutanan No P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada wilayah yang vegetasinya rawan untuk terbakar misalnya pada wilayah gambut. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan pembukaan lahan oleh manusia.

Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Nusa Tenggara Barat ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari

setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Dari hasil analisis, total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan adalah seluas 1.082.289 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 466.522 Ha, kelas sedang seluas 532.959 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas tinggi adalah seluas 82.808 Ha.

6. Bencana Alam Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.¹ Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan yang dikaji dalam dokumen ini adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi awal terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun metode analisis indeks kekeringan yang dilakukan adalah Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) yang dikembangkan oleh Vicente-Serrano et al pada tahun 2010. Penentuan kekeringan dengan SPEI membutuhkan data curah hujan dan suhu udara bulanan dengan periode waktu yang cukup panjang. Perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode Thornthwaite, maka data suhu yang digunakan adalah hanya suhu bulanan rata-rata.

Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota terdampak kekeringan, sedangkan kelas bahaya kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Barat ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdampak bencana kekeringan. Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan adalah 1.857.232 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya kekeringan tersebut dirinci menjadi 2 (dua) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas sedang seluas 820.200 Ha dan kelas tinggi seluas 1.037.032 Ha.

Tidak ada wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikategorikan ke dalam kelas rendah untuk bahaya kekeringan.

1.5.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Nusa Tenggara Barat secara makro adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Kinerja ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,30 persen dibandingkan tahun 2020. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 8,94 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 67,60 persen.

Selanjutnya, berdasarkan sumber laju pertumbuhan secara year-on-year triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 ekonomi Nusa Tenggara Barat juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,16 persen. Dimana dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,14 persen sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,72 persen.

Secara umum perekonomian Nusa Tenggara Barat mulai pulih setelah dua tahun secara nasional mengalami dampak pandemi Covid-19. Adapun struktur PDRB Nusa Tenggara Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan IV tahun 2021 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,95 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalan sebesar 18,69 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,82 persen; dan Konstruksi sebesar 10,76 persen. Sedangkan PDRB Nusa Tenggara Barat dari sisi pengeluaran Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 67,60 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,81 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 1,79 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang

Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 0,54 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 0,52 persen. Sementara itu, Komponen Impor LN yang menjadi pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran mengalami kontraksi sebesar 43,22 persen.

Kinerja ekonomi Nusa Tenggara Barat pada triwulan IV-2021 menunjukkan arah perbaikan terutama dari sisi lapangan usaha dan komponen pengeluaran yang memberikan andil terbesar dalam perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat, hal ini memberikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi selama tahun 2021 lebih baik dibanding tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat mengalami kontraksi sebesar 0,64 persen pada tahun 2020. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi mulai pada triwulan III-2020 sebesar 1,25 persen, dengan kontraksi terdalam terjadi pada kategori industri pengolahan sebesar 20,02 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kontraksi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit (PK-LNPRT) sebesar 0,96 persen, hal ini menyebabkan penurunan aktivitas produksi pada beberapa lapangan usaha.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan yang lebih baik dari nasional, walaupun angka pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat secara nasional belum tercapai. Selanjutnya perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat dibandingkan dengan Provinsi sekitar seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat termasuk dalam kelompok sudah memenuhi target dalam RKP dimana Provinsi sekitarnya tersebut masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target). Adapun Bali pada tahun 2021 mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,47 persen selanjutnya Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57 persen, Nusa Tenggara Timur dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,51 persen dan Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,65 persen serta semua Provinsi sekitar yang menjadi perbandingan dari laju pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami deviasi dari nilai target RKP yaitu di bawah 5 persen.

Selanjutnya perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2021 mencapai Rp140,15 triliun sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp95,44 triliun, ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat dibandingkan tahun 2020 dengan ADHB sebesar Rp133,61 triliun dan berdasarkan ADHK 2010 mencapai Rp93,288 triliun merupakan refleksi capaian yang diperoleh dalam pembangunan dimana nilai tambah barang dan jasa meningkat pada tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.

Pada sisi pengeluaran terjadi pertumbuhan pada tahun 2021 berdasarkan PDRB atas dasar berlaku dan harga konstan 2010. Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 67,60 persen, selanjutnya Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 3,81 persen dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1,79 persen. dimana ada salah satu komponen yang mengalami kontraksi sangat tinggi melebihi tahun 2020 adalah pada komponen Impor Luar Negeri sebesar -43,22 persen pada tahun 2021.

Secara spasial struktur perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat terbentuk oleh sepuluh (10) Kabupaten/kota, dimana pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat sebesar 2,30 persen. Adapun Kabupaten/kota yang mengalami kontraksi pada tahun 2021 adalah Kabupaten Sumbawa Barat dengan kontraksi sebesar 0,33 persen. selanjutnya Kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi adalah pada Kabupaten Lombok Barat dengan laju pertumbuhan sebesar 3,40 persen.

1.6. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya Tim Penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi Tim Penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Provinsi Nusa

Tenggara Barat yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh Tim Penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh Tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kesemuanya harus dipedomani oleh setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022-2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MADYA			86,4 %
1 .	Pendidikan Menengah				80,3 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	64,4 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	65.848	52.969	12879	80,4 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15,9 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	79,5 %
	1 . Buku teks pelajaran	65.848	37.938	7.910	57,6 %
	2 . Perlengkapan belajar	65.848	6.422	59.426	9,8 %
	3 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	7.001	7.001	-	100,0 %
	4 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	671	620	51	92,4 %
	5 . Penyediaan biaya personil peserta didik	65.848	52.969	12.879	80,4 %
	6 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	16.658	16.186	472	97,2 %
	7 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	671	668	3	99,6 %
	8 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	14.759	14.662	97	99,3 %
	JUMLAH	237.304	136.466	100.838	636,3 %

2 .	Pendidikan Khusus				92.6 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	20 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	2,897	2,897	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				12.62 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	63.10 %
	1 . Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	2,897	0	2,897	0 %
	2 . Perlengkapan belajar	2,897	617	2,28	21.30 %
	3 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	50	42	8	84.00 %
	4 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	956	956	0	100.00 %
	5 . Penyediaan biaya personil peserta didik	2,897	409	2,488	14.12 %
	6 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	723	657	66	90.87 %
	7 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	50	50	0	100.00 %
	8 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	109	103	6	94.50 %
	JUMLAH	10,579	2,834	7,745	504.79 %

Sumber: Laporan SPM Daerah (e-SPM)

2.2.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA			90.00 %
1 .	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi				90.00 %
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	27,707	27,707	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				10.00 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	50.00 %
	1 . Obat-obatan dan Bahan medis habis pakai	0	0	0	0 %
	2 . Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak [PMBA] dll.)	0	0	0	0 %
	3 . Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	0	0	0	0 %
	4 . Dokter	1,972	1,972	0	100.00 %
	5 . Perawat	11,552	11,552	0	100.00 %
	6 . Bidan	7,29	7,29	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain	0	0	0	0 %
	8 . Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	0	0	0	0 %
	9 . Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	1,802	1,802	0	100.00 %
	10 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	879	879	0	100.00 %
	JUMLAH	23,495	23,495	0	500.00 %

2 .	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi				90.00 %
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	4,2	4,2	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				10.00 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	50.00 %
	1 . Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	0	0	0	0 %
	2 . Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	0	0	0	0 %
	3 . Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	0	0	0	0 %
	4 . Tempat sampah biologis	0	0	0	0 %
	5 . Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	0	0	0	0 %
	6 . Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	0	0	0	0 %
	7 . Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	0	0	0	0 %
	8 . Dokter	1,972	1,972	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	3	3	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	593	593	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	4	4	0	100.00 %
	12 . Tenaga Laboratorium	1,216	1,216	0	100.00 %
	13 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	204	204	0	100.00 %
	14 . Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	3	3	0	100.00 %
	JUMLAH	3,995	3,995	0	700.00 %

Sumber : Laporan SPM Daerah (e-SPM)

2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	BELUM TUNTAS			0 %
1 .	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota				0 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	0 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	0	0	0	0 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				0 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	0 %
	1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	0	0	0	0 %
	2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	0	0	0	0 %
	JUMLAH	0	0	0	0 %
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota				0 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	0 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	0	0	0	0 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				0 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	0 %
	1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	0	0	0	0 %
	2 . Kualitas pelayanan air limbah domestic	0	0	0	0 %
	JUMLAH	0	0	0	0 %

Sumber : Laporan SPM Daerah (e-SPM)

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	TIDAK ADA BENCANA			100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	0	0	0	80.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	20.00 %
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0 %
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	10	10	0	100.00 %
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0	0 %
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	0	0	0 %
	JUMLAH	10	10	0	100.00 %
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	0	0	0	80.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	20.00 %
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0	0 %
	2 . Subsidi uang sewa	0	0	0	0 %
	3 . Penyediaan rumah layak huni	0	0	0	0 %
	JUMLAH	0	0	0	0 %

Sumber : Laporan SPM Daerah (e-SPM)

2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA			96.00 %
1 .	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi				96.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	88	88	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.00 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	80.00 %
	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	58	58	0	100.00 %
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	30	30	0	100.00 %
	3 . Standar sarana prasarana Satpol PP	35	35	0	100.00 %
	4 . Standar operasional prosedur Satpol PP	6	6	0	100.00 %
	5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	449	0	449	0 %
	6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	5	4	1	80.00 %

Sumber : Laporan SPM Daerah (e-SPM)

2.2.6. Bidang Sosial

Tabel 2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA			98.01 %
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti				94.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	100	100	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				14.67 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	73.33 %
	1 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0 %
	2 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	0	0 %
	3 . Penyediaan sandang	100	100	0	100.00 %
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Disabilitas	4	4	0	100.00 %
	5 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0 %
	6 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	0	0 %
	7 . Penyediaan alat bantu	10	10	0	100.00 %
	8 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	10	10	0	100.00 %
	9 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	5	5	0	100.00 %
	10 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	5	5	0	100.00 %
	11 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Penduduk	1	1	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	50	50	0	100.00 %
	13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	50	50	0	100.00 %
	14 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Disabilitas	100	100	0	100.00 %
	15 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	7	7	0	100.00 %
	JUMLAH	342	342	0	1,100.00 %

2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti				100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	254	254	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100 %
	1 . Pengasuhan	254	254	0	100.00 %
	2 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Anak	254	254	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak	1	1	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	254	254	0	100.00 %
	5 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Anak	22	22	0	100.00 %
	6 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak	1	1	0	100.00 %
	7 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	25	25	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	39	39	0	100.00 %
	9 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	28	28	0	100.00 %
	10 . Fasilitas pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	1	1	0	100.00 %
	11 . Akses ke layanan pendidikan	8	8	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	69	69	0	100.00 %
	13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	68	68	0	100.00 %
	JUMLAH	1,024	1,024	0	1,300.00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	130	130	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia	1	1	0	100.00 %
	2 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia dan merujuk ke Panti Masyarakat	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan sandang	130	130	0	100.00 %
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia	19	19	0	100.00 %
	5 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia	1	1	0	100.00 %
	6 . Penyediaan alat bantu	56	56	0	100.00 %

	7 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	20	20	0	100.00 %
	8 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia dan merujuk ke Panti Masyarakat	1	1	0	100.00 %
	9 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	10	10	0	100.00 %
	10 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	8	8	0	100.00 %
	11 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Penduduk	1	1	0	100.00 %
	12 . Akses ke layanan kesehatan dasar	2	2	0	100.00 %
	13 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	85	85	0	100.00 %
	14 . Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	1	1	0	100.00 %
	15 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	85	85	0	100.00 %
	16 . Pemulasaraan	8	8	0	100.00 %
	17 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat	1	1	0	100.00 %
	18 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat	1	1	0	100.00 %
	19 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia	130	130	0	100.00 %
	JUMLAH	561	561	0	1,900.00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				95.38 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	75	75	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.38 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	76.92 %
	1 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	75	75	0	100.00 %
	2 . Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	0	0 %
	3 . Penyediaan sandang	75	75	0	100.00 %
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang nmmiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	14	14	0	100.00 %
	5 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	0	0	0	0 %
	6 . Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis dan merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0 %
	7 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	13	13	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	6	6	0	100.00 %
	9 . Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	5	5	0	100.00 %
	10 . Pemberian bimbingan keterampilan dasar	4	4	0	100.00 %

	11 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	100.00 %
	12 . Akses ke layanan pendidikan	5	5	0	100.00 %
	13 . Pemulangan ke daerah asal	75	75	0	100.00 %
	JUMLAH	273	273	0	1,000.00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	10,580	10,580	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	1	1	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	4,388	4,388	0	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	300	300	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	6,192	6,192	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	10,882	10,882	0	500.00 %

Sumber : Laporan SPM Daerah (e-SPM)

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1 .	PENGUMPULAN DATA
	Data yang diperoleh dari Dinas Sosial untuk tahun 2022 adalah data makro yang hanya menyajikan data peserta didik miskin usia 16 s.d. 18 dan usia 14 s.d. 18 penyandang disabilitas, namun tidak menyajikan dimana mereka bersekolah sehingga menyulitkan dalam perhitungan dan pendistribusian kepada calon penerima nanti, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pusat terkait pembatasan akses provinsi terhadap data BNBA pada aplikasi
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
	Mengingat data yang diperoleh dari Dinas Sosial tersebut adalah data makro maka terjadi kendala pada saat melakukan perhitungan kebutuhan sesuai jenjang baik itu SMA, SMK, MA dan bahkan jenjang SLB karena data tersebut tidak memuat dimana calon peneriam itu bersekolah
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
	Terbatasnya ketersediaan anggaran menyebabkan pelaksanaan penerapan SPM tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal
4 .	PELAKSANAAN
	Sebagian Pagu dana untuk penerapan SPM dilakukan refocusing sehingga mempengaruhi pelaksanaan / penerapan SPM
5 .	LAIN – LAIN
	Belum adanya persamaan persepsi antara semua stake holder terkait yang terlibat secara langsung dalam penerapan SPM baik stake holder internal maupun eksternal OPD sehingga pembiayaan SPM belum menjadi prioritas dan masih selalu dijadikan sasaran pada saat dilakukan refocusing anggaran

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1 .	PENGUMPULAN DATA
	Pendataan (pengumpulan data) warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Bidang Urusan Kesehatan belum selesai secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan penetapan sasaran target yang mendapatkan pelayanan SPM Kesehatan belum

	maksimal
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
	Perhitungan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pelayanan Bidang Urusan Kesehatan belum maksimal,
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
	Alokasi anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan Bidang Urusan Kesehatan secara menyeluruh. Khawatir terjadi SILPA
4 .	PELAKSANAAN
	Terjadinya Bencana Alam dan Keadaan Luar Biasa yang tidak dapat diprediksi
5 .	LAIN – LAIN

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1 .	PENGUMPULAN DATA
	1. Pengumpulan data masih dilakukan dalam bentuk data sekunder, sehingga perlu adanya pengumpulan data lebih lanjut dengan memperhatikan kondisi eksisting atau data primer 2. Pengumpulan data tidak berdasarkan dengan RISPAM Provinsi, hal ini dikarenakan RISPAM Provinsi belum dilakukan kajian ulang.
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
	Disebabkan karena belum adanya data yang valid maka perhitungan kebutuhan tidak dapat dilaksanakan
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
	Kebijakan anggaran yang belum kondusif dengan kondisi anggaran yang terbatas. Persepsi yang berbeda dari pemangku kebijakan
4 .	PELAKSANAAN
5 .	LAIN – LAIN

2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1 .	PENGUMPULAN DATA
	1. Untuk identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan bagi korban bencana atau akibat adanya program pemerintah

	dibutuhkan adanya kajian 2. Untuk melakukan identifikasi perumahan di lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi, dibutuhkan peta eksisting perumahan
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
	Belum ada data BNBA rumah yang terkena bencana provinsi dan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah provinsi sebagai dasar perhitungan kebutuhan
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
	1. Beberapa sub kegiatan terkait penerapan SPM Perumahan Rakyat belum masuk dalam Renstra Disperkim sehingga pelaksanaan SPM menjadi kurang maksimal 2. Belum ada kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Pengembangan Perumahan Baru Skala Besar melalui Penyediaan Akses yang mengharuskan masyarakat direlokasi. Terhadap kebijakan melakukan relokasi terhadap masyarakat dalam hal Pengurangan Kawasan Kumuh 10-15 Ha
4 .	PELAKSANAAN
5 .	LAIN – LAIN

2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1 .	PENGUMPULAN DATA
	1. Lokasi Operasi Penegakan Perda dan Perkada yang tidak tentu menyebabkan pendataan (pengumpulan data) warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan SPM Tramtibum belum maksimal 2. Kualitas Kemampuan Personil Satpol PP yang masih rendah 3. Dukungan Sarana dan Prasarana masih kurang
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
	Perhitungan anggaran untuk pelaksanaan pelayanan Bidang Urusan Tramtibum Tahun 2022 juga belum maksimal, sehingga alokasi anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan Bidang Urusan Tramtibum secara menyeluruh.
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
	Masih sering terjadinya pergeseran anggaran. Kurangannya komitmen anggaran dari pemangku kebijakan
	PELAKSANAAN
5 .	LAIN – LAIN

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1 .	PENGUMPULAN DATA
	Masih lemahnya penyediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia, terlantar dan gelandangan pengemis
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
	Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam panti / UPTD Lingkup Dinas Sosial NTB, hal ini berdampak di dalam melakukan penghitungan kebutuhan terhadap rencana program dan kegiatan ysng belum maksimal sesuai dengan perhitungan kebutuhan kelayan panti
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
	Adanya refocussing anggaran yang berimbas pada kurang maksimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam menagani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di dalam panti
4 .	PELAKSANAAN
5 .	LAIN – LAIN

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

KODE REKENING			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
1			2			3	4	5	
			SPM PENDIDIKAN						
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1	01	02	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA					
1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	
1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	
1	01	02	1.01	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	
1	01	02	1.01	0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	
1	01	02	1.01	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Paket	
1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	

1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasikebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	1.01	0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	.01	02	1.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK				
1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.02	0032	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang	Unit

							Tersedia	
1	01	02	1.02	0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	1.02	0038	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	Dokumen

						Layanan di Bidang Pendidikan	Layanan di Bidang Pendidikan	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	1.02	0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	1.02	0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang
1	01	02	1.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang
1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	.01	02	1.03	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus				
1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket

1	01	02	1.03	0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan

1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Sekolah Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang
1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	1.03	0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
1	01	04	1.01	Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten / Kota Dalam Satu Provinsi				
1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen
1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan

3.1.2.SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1				2		3	4	5
			SPM KESEHATAN					
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
1	02	02	1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	Orang
1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen

3.1.3.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
1				2		3	4	5	
			SPM PEKERJAAN UMUM						
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
1	03	03	101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) LintasKabupaten/Kota					
1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten / Kota	
1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	
1	03	03	1.01	0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	
1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik	
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
1	03	05	1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional					
1	03	05	1.01	0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	M³/Hari	
1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	

1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
1	03	07	1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				
1	03	07	1.01	0009	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	Rumah Tangga
1	03	07	1.01	0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Liter/Detik
1	03	07	1.01	0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Unit
1	03	07	1.01	0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	SR

3.1.4.SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1					2	3	4	5
					SPM PERUMAHAN RAKYAT			
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
1	04	02	101		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	101	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
1	04	02	101	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen
1	04	02	101	0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
1	04	02	101	0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
1	04	02	101	0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen
1	04	02	101	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen
1	04	02	101	0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen

1	04	02	102	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				
1	04	02	102	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang
1	04	02	102	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan	Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan	Orang
1	04	02	103	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				
1	04	02	103	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah
1	04	02	103	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah

3.1.5.SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1				2		3	4	5
			SPM TRANTIBUM					
1.	05.	02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
1.	05.	02.	1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
1.	05.	02.	1.01.	05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Tersedianya Personil Satpol PP yang dibina	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
1.	05.	02.	1.01.	07	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit
1.	05.	02.	1.01.	08	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen
1.	05.	02.	1.01.	09	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya Pelayanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan
1.	05.	02.	1.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				
1.	05.	02.	1.03.	01	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan

3.1.6.SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1				2		3	4	5
			SPM SOSIAL					
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
1	06	04	101	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti				
1	06	04	101	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Penyediaan Makan dan Minum bagi Penyandang Disabilitas Dalam Panti sesuai standar gizi	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum bagi Penyandang Disabilitasdi Dalam Panti	Orang
1	06	04	101	02	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan sehari - hari bagi Penyandang Disabilitas Dalam Panti	Jumlah Penyediaan Pakaian bagi Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Orang
1	06	04	101	03	Penyediaan asraman yang mudah diakses	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Asrama dan Wisma yang digunakan untuk Penyandang Disabilitas Dalam Panti	Jumlah sarana / prasarana Asrama dan Wisma di Dalam Panti	Jenis Barang
1	06	04	101	04	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Alat Bantu Dalam Panti bagi Kelayan Disabilitas	Jumlah Alat bantu yang Disediakan Dalam Panti	Jenis Barang
1	06	04	101	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Penyediaan Obat-obatan bagi Penyandang Disabilitas Dalam Panti	Jumlah Penyediaan Obat-obatan bagi Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Jenis Barang
1	06	04	101	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terpenuhinya Jasa Instruktur dan Pendamping Kegiatan Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Diasbilitas dalam Panti	Jumlah Instruktur dan Pendamping Kegiatan Bimbingan Sosial dan Keterampilan	Orang
1	06	04	101	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Terpenuhinya jasa Instruktur Senam dan Pendamping Kegiatan Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari bagi Penyandang Diasbilitas dalam Panti	Jumlah Instruktur Senam bagi Kelayan Penyandang Disabilitas Dalam Panti	Orang
1	06	04	101	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti	Terlaksananya Perjalanan DinasSeleksi Motivasi, Suvervisi, Penelusuran/ Reunifikasi Keluarga, Monitoring, Evaluasi dan Bimbingan Lanjut	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	Laporan
1	06	04	1.02	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (PSAA) Generasi Harapan Mataram				

1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	Terpenuhinya honorarium bagi Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis Pengasuh Asrama Kelayan Panti	Jumlah Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis Pengasuh Asrama Kelayan Panti	Orang
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Penyediaan Makan dan Minum bagi Anak Terlantar Dalam Panti sesuai standar gizi	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Orang
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan sehari - hari bagi Anak Terlantar Dalam Panti	Jumlah Penyediaan Pakaian bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Jenis
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Asrama dan Wisma yang digunakan untuk Anak Terlantar Dalam Panti	Jumlah sarana / prasarana Asrama dan Wisma di Dalam Panti	Jenis Barang
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Terpenuhinya Penyediaan Obat-obatan bagi Anak Terlantar Dalam Panti	Jumlah Penyediaan Obat-obatan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Jenis Barang
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terpenuhinya Jasa Instruktur dan Pendamping Kegiatan Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Anak Terlantar dalam Panti	Jumlah Instruktur dan Pendamping Kegiatan Bimbingan Sosial dan Keterampilan	Orang
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Terpenuhinya Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan bagi Kebutuhan Anak Terlantar Dalam Panti	Jumlah Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang disediakan bagi Kebutuhan Anak Terlantar Dalam Panti	Jenis Layanan
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti	Terlaksananya Perjalanan Dinas Seleksi Motivasi, Supervisi, Penelusuran/ Reunifikasi Keluarga, Monitoring, Evaluasi dan Bimbingan Lanjut serta bantuan bagi LKS yang menagani Anak	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	Laporan
1	06	04	1.02	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (PSBR) KARYA MANDIRI Mataram				
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Penyediaan Makan dan Minum bagi Anak Terlantar Dalam Panti sesuai standar gizi	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Orang
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan sehari - hari bagi Anak Terlantar Dalam Panti	Jumlah Penyediaan Pakaian bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Orang
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Asrama dan Wisma yang digunakan untuk Anak Terlantar Dalam Panti	Jumlah sarana / prasarana Asrama dan Wisma di Dalam Panti	Jenis Belanja
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Terpenuhinya Penyediaan Obat-obatan bagi Anak Terlantar Dalam Panti	Jumlah Penyediaan Obat-obatan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Jenis Barang

1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terpenuhinya Sarana Prasarana Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan bagi Anak Terlantar Dalam Panti	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan bagi Anak Terlantar Dalam Panti	Jenis Belanja
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar	Terlaksananya Perjalanan Dinas Seleksi Motivasi, Pemanggilan dan Pemulangan Klien, Penyaluran, Bimbingan Lanjut dan	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	Laporan
1	06	04	1.02	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (PSPPA) SASAMBO MATUPA Selat Narmada				
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Penyediaan Makan dan Minum bagi Anak Terlantar Dalam Panti sesuai standar gizi	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Orang
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan sehari - hari bagi Anak Terlantar Dalam Panti	Jumlah Penyediaan Pakaian bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Orang
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Asrama dan Wisma yang digunakan untuk Anak Terlantar Dalam Panti	Jumlah sarana / prasarana Asrama dan Wisma di Dalam Panti	Jenis Belanja
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Terpenuhinya Penyediaan Obat-obatan bagi Anak Terlantar Dalam Panti	Jumlah Penyediaan Obat-obatan bagi Anak Terlantar di Dalam Panti	Jenis Belanja
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terpenuhinya Sarana Prasarana Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan bagi Anak Terlantar Dalam Panti dan Honorarium Instruktur, Pendamping dan Pengasuh Asrama	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan bagi Anak Terlantar Dalam Panti dan Penyediaan Jasa Instruktur, Pendamping dan Pengasuh Asrama	Jenis Belanja
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya Perjalanan Dinas Pemanggilan dan Pemulangan Kelayan panti	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Pemanggilan dan Pemulangan Kelayan Panti	Tahun
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar	Terlaksananya Perjalanan Dinas Koordinasi, Rujukan dan Bimbingan Lanjut	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	Laporan
1	06	04	1.02	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSLU) MANDALIKA Mataram				
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Penyediaan Makan dan Minum bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti sesuai standar gizi	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum bagi Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Orang
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan sehari - hari bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	Jumlah Penyediaan Pakaian bagi Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Orang

1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Asrama dan Wisma yang digunakan untuk Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	Jumlah sarana / prasarana Asrama dan Wisma di Dalam Panti	Jenis Belanja
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Terpenuhinya Penyediaan Obat-obatan bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti dan Honorarium Tim Kesehatan	Jumlah Penyediaan Obat-obatan bagi Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti dan Jasa Tim Kesehatan	Jenis Belanja
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terpenuhinya Honorarium Instruktur, Pendamping dan Pembimbing Kelayan Dalam Panti	Jumlah Instruktur, Pendamping dan Pembimbing Kelayan Dalam Panti	Orang
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Terlaksananya Bimbingan Aktivitas Hidup bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	Jumlah Instruktur Senam bagi Kelayan Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	Otong
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya layanan reunifikasi keluarga bagi lanjut usia terlarant dalam panti	Jumlah layanan reunifikasi keluarga bagi lanjut usia terlarant dalam panti	Tahun
1	06	04	1.02	12	Pemulasaraan	Terpenuhinya Sarana Prasarana Pemulasaraan bagi Lanjut Usia yang Meninggal dan Honorarium Tim Petugas Pemulasaraan	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Pemulasaraan bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti yang Meninggal dan Jasa Tim Petugas Pemulasaraan	Jenis Belanja
1	06	04	1.02	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (PSLU) MECI ANGI Bima				
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Penyediaan Makan dan Minum bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti sesuai standar gizi	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum bagi Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Orang
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan sehari - hari bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	Jumlah Penyediaan Pakaian bagi Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Orang
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Asrama dan Wisma yang digunakan untuk Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	Jumlah sarana / prasarana Asrama dan Wisma di Dalam Panti	Jenis Barang
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Terpenuhinya Penyediaan Obat-obatan bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	Jumlah Penyediaan Obat-obatan bagi Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jenis Belanja
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terpenuhinya Sarana Prasarana Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti dan Honorarium Instruktur/Pengajar	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti dan Tenaga Instruktur / Pengajar	Jenis Belanja
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Terlaksananya Perjalanan Dinas Pemanggilan dan Pemulangan Kelayan	Jumlah Instruktur Senam bagi Kelayan Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	Orang

1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya Bimbingan Aktivitas Hidup bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	Jumlah Laporan Kegiatan Rekreasional Kelayan Panti, Perjalanan Dinas Home Visit dan Bimbingan Lanjut	Jenis Belanja
1	06	04	1.02	12	Pemulasaraan	Terpenuhinya Sarana Prasarana Pemulasaraan bagi Lanjut Usia yang Meninggal dan Honorarium Tim Petugas Pemulasaraan	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Pemulasaraan bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti yang Meninggal dan Jasa Tim Petugas Pemulasaraan	Jenis Belanja
1	06	04	1.04	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti (PSBK) MADANI Aikmal Lotim				
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Penyediaan Makan dan Minum bagi Gelandangan dan Pengemiss Dalam Panti sesuai standar gizi	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum bagi Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Orang
1	06	04	1.04	02	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan sehari - hari bagi Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti	Jumlah Penyediaan Pakaian bagi Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Orang
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Asrama dan Wisma yang digunakan untuk Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti	Jumlah sarana / prasarana Asrama dan Wisma di Dalam Panti	Jenis Barang
1	06	04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Terpenuhinya Penyediaan Obat-obatan bagi Gelandangan dan Pengemis Dalam	Jumlah Penyediaan Obat-obatan bagi Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jenis Barang
1	06	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terpenuhinya Sarana Prasarana Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan bagi Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti	Jumlah Instruktur / Perndamping Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan bagi Gelandangan dan Pengemis	Orang
1	06	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terpenuhinya Sarana Prasarana Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan bagi Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan bagi Gelandangan dan Pengemis Dalam	Jenis Belanja
1	06	04	1.04	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti	Terlaksananya Perjalanan Dinas Seleksi, Pemanggilan dan Pemulangan Kelayan, Home Visit dan Bimbingan Lanjut	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	Laporan
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
1	06	06	1.01	Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Penyediaan Makan dan Minum bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Kapasitas ketersediaan logistic (permakanan) bagi korban bencana alam dan sosial	Jenis Barang
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Penyediaan Pakaian dan	Kapasitas ketersediaan logistic (sandang)	Jenis

						Kelengkapan sehari - hari bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	bagi korban bencana alam dan sosial	Barang
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Terpenuhinya penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Pengungsi	Kapasitas ketersediaan daya tampung / Tempat mengungsi bagi korban bencana alam dan sosial	Unit
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Korban Rentan	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Warga Korban Rentan akibat Bencana	Jumlah Kegiatan Penanganan Warga Korban Rentan akibat Bencana	Kegiatan
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terlaksananya Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana	Layanan

3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.1 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pendidikan Menengah SMA		29.834	28.292	28.292						Dinas Dikbud
1	Angka partisipasi kasar	%	110,36			100	100	276.046.702.000		APBD	sda
2	Angka partisipasi sekolah	%	98,50			98,02	98,02	276.046.702.000		APBD	sda
3	Angka partisipasi murni	%	98,04			95,28	95,28	276.046.702.000		APBD	sda
4	Kemampuan literasi	Nilai	41,19			40,69	40,69	54.116.971.900		APBD	sda
5	Kemampuan numerasi	Nilai	25			33,35	33,35	54.116.971.900		APBD	sda
6	Perbedaan skor literasi	Nilai	2,76			3,67	3,67	54.116.971.900		APBD	sda
7	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,26			1,55	1,55	54.116.971.900		APBD	sda
8	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,52			67,62	67,62	1.410.498.400		APBD	sda
9	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	60,92			66,82	66,82	1.410.498.400		APBD	sda
10	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53,24			55,67	55,67	1.410.498.400		APBD	sda
11	Kecukupan formasi guru ASN	%	95,10			96	96	51.046.014.300		APBD	sda
12	Indeks Distribusi Guru	%	0,51			0,42	0,42	51.046.014.300		APBD	sda
13	Proporsi PTK bersertifikat	%	38,11			50	50	51.046.014.300		APBD	sda
14	Proporsi PTK penggerak	%	1,38			0,84	0,84	51.046.014.300		APBD	sda
15	Pengalaman pelatihan guru	%	9,94			15	15	1.186.588.500		APBD	sda
	SMK		23.135	22.952	22.952						Dinas Dikbud
1	Angka partisipasi kasar	%	110,36			100	100	236.365.818.100		APBD	sda
2	Angka partisipasi sekolah	%	98,50			98,02	98,02	236.365.818.100		APBD	sda
3	Angka partisipasi murni	%	98,04			95,28	95,28	236.365.818.100		APBD	sda
4	Kemampuan literasi	Nilai	28,37			27,77	27,77	54.618.462.700		APBD	sda
5	Kemampuan numerasi	Nilai	22			23,82	23,82	54.618.462.700		APBD	sda
6	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	34,01			37	37	1.504.753.300		APBD	sda
7	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	100			100	100	1.504.753.300		APBD	sda
8	Perbedaan skor literasi	Nilai	1,84			2,87	2,87	54.618.462.700		APBD	sda
9	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,34			1,11	1,11	54.618.462.700		APBD	sda
10	Indeks iklim keamanan	Nilai	64,12			62,48	62,48	598.998.400		APBD	sda
11	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	57,76			62,04	62,04	598.998.400		APBD	sda
12	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	51,10			53,30	53,30	598.998.400		APBD	sda
13	Kecukupan formasi guru ASN	%	79,75			83,30	83,30	51.046.014.300		APBD	sda
14	Indeks Distribusi Guru	%	0,51			0,32	0,32	51.046.014.300		APBD	sda
15	Proporsi PTK bersertifikat	%	30,43			44,34	44,34	51.046.014.300		APBD	sda
16	Proporsi PTK penggerak	%	0,06			0,08	0,08	51.046.014.300		APBD	sda
17	Pengalaman pelatihan guru	%	7,19			7,81	7,81	860.810.500		APBD	sda

2)	Pendidikan Khusus		409	500	500						Dinas Dikbud
1	Angka partisipasi sekolah	%	86,83			86,85	86,85	34.541.312.500		APBD	sda
2	Kemampuan literasi	Nilai	49,81			43,56	43,56	168.065.800		APBD	sda
3	Kemampuan numerasi	Nilai	37,37			30,41	30,41	87.246.391.100		APBD	sda
4	Perbedaan skor literasi	Nilai	7			3,65	3,65	87.246.391.100		APBD	sda
5	Perbedaan skor numerasi	Nilai	5,38			2,87	2,87	87.246.391.100		APBD	sda
6	Indeks iklim keamanan	Nilai	73,21			69,78	69,78	135.501.300		APBD	sda
7	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	60,37			62,89	62,89	135.501.300		APBD	sda
8	Indeks inklusivitas	Nilai	56,66			56,66	56,66	135.501.300		APBD	sda
9	Kecukupan formasi guru ASN	%	59,84			52,60	52,60	51.046.014.300		APBD	sda
10	Indeks Distribusi Guru	%	0,43			0,51	0,51	51.046.014.300		APBD	sda
11	Proporsi PTK bersertifikat	%	21,74			37,55	37,55	51.046.014.300		APBD	sda
12	Proporsi PTK penggerak	%	NA			25	25	51.046.014.300		APBD	sda
13	Pengalaman pelatihan guru	%	4,08			23,32	23,32	35.063.621.500		APBD	sda
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pendidikan Menengah SMA		29.834	31.121	31.121						Dinas Dikbud
1	Angka partisipasi kasar	%	110,36			100,00	100	317.453.707.300		APBD	sda
2	Angka partisipasi sekolah	%	98,50			98,60	98,60	317.453.707.300		APBD	sda
3	Angka partisipasi murni	%	98,04			98,10	98,10	317.453.707.300		APBD	sda
4	Kemampuan literasi	Nilai	41,19			41	41	62.234.517.685		APBD	sda
5	Kemampuan numerasi	Nilai	25			33,85	33,85	62.234.517.685		APBD	sda
6	Perbedaan skor literasi	Nilai	2,76			3,72	3,72	62.234.517.685		APBD	sda
7	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,26			1,57	1,57	62.234.517.685		APBD	sda
8	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,52			67,67	67,67	1.622.073.160		APBD	sda
9	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	60,92			66,87	66,87	1.622.073.160		APBD	sda
10	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53,24			55,72	55,72	1.622.073.160		APBD	sda
11	Kecukupan formasi guru ASN	%	95,10			97	97	58.702.916.445		APBD	sda
12	Indeks Distribusi Guru	%	0,51			0,45	0,45	58.702.916.445		APBD	sda
13	Proporsi PTK bersertifikat	%	38,11			63	63	58.702.916.445		APBD	sda
14	Proporsi PTK penggerak	%	1,38			1,43	1,43	58.702.916.445		APBD	sda
15	Pengalaman pelatihan guru	%	9,94			20	20	1.364.576.775		APBD	sda
	SMK		23.135	25.247	25.247						Dinas Dikbud
1	Angka partisipasi kasar	%	110,36			100,00	100	271.820.690.815		APBD	sda
2	Angka partisipasi sekolah	%	98,50			98,60	98,60	271.820.690.815		APBD	sda
3	Angka partisipasi murni	%	98,04			98,10	98,10	271.820.690.815		APBD	sda
4	Kemampuan literasi	Nilai	28,37			27,82	27,82	62.811.232.105		APBD	sda
5	Kemampuan numerasi	Nilai	22			23,87	23,87	62.811.232.105		APBD	sda
6	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	34,01			37,50	37,50	1.730.466.295		APBD	sda
7	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	100			100	100	1.730.466.295		APBD	sda
8	Perbedaan skor literasi	Nilai	1,84			2,89	2,89	62.811.232.105		APBD	sda
9	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,34			1,13	1,13	62.811.232.105		APBD	sda

10	Indeks iklim keamanan	Nilai	64,12			62,53	62,53	688.848.160		APBD	sda
11	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	57,76			62,54	62,54	688.848.160		APBD	sda
12	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	51,10			53,80	53,80	688.848.160		APBD	sda
13	Kecukupan formasi guru ASN	%	79,75			87,85	87,85	58.702.916.445		APBD	sda
14	Indeks Distribusi Guru	%	0,51			0,37	0,37	58.702.916.445		APBD	sda
15	Proporsi PTK bersertifikat	%	30,43			58,25	58,25	58.702.916.445		APBD	sda
16	Proporsi PTK penggerak	%	0,06			0,10	0,10	58.702.916.445		APBD	sda
17	Pengalaman pelatihan guru	%	7,19			8,31	8,31	989.932.075		APBD	sda
2)	Pendidikan Khusus		409	550	550						Dinas Dikbud
1	Angka partisipasi sekolah	%	86,83			87,83	87,83	39.722.509.375		APBD	sda
2	Kemampuan literasi	Nilai	49,81			43,61	43,61	193.275.670		APBD	sda
3	Kemampuan numerasi	Nilai	37,37			30,46	30,46	100.333.349.765		APBD	sda
4	Perbedaan skor literasi	Nilai	7			3,67	3,67	100.333.349.765		APBD	sda
5	Perbedaan skor numerasi	Nilai	5,38			2,92	2,92	100.333.349.765		APBD	sda
6	Indeks iklim keamanan	Nilai	73,21			69,83	69,83	155.826.495		APBD	sda
7	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	60,37			62,94	62,94	155.826.495		APBD	sda
8	Indeks inklusivitas	Nilai	56,66			56,71	56,71	155.826.495		APBD	sda
9	Kecukupan formasi guru ASN	%	59,84			64,50	64,50	58.702.916.445		APBD	sda
10	Indeks Distribusi Guru	%	0,43			0,56	0,56	58.702.916.445		APBD	sda
11	Proporsi PTK bersertifikat	%	21,74			53,36	53,36	58.702.916.445		APBD	sda
12	Proporsi PTK penggerak	%	NA			50	50	58.702.916.445		APBD	sda
13	Pengalaman pelatihan guru	%	4,08			42,56	42,56	40.323.164.725		APBD	sda
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pendidikan Menengah SMA		29.834	34.233	34.233						Dinas Dikbud
1	Angka partisipasi kasar	%	110,36			100	100	365.071.763.395		APBD	sda
2	Angka partisipasi sekolah	%	98,50			98,65	98,65	365.071.763.395		APBD	sda
3	Angka partisipasi murni	%	98,04			98,15	98,15	365.071.763.395		APBD	sda
4	Kemampuan literasi	Nilai	41,19			42	42	71.569.695.338		APBD	sda
5	Kemampuan numerasi	Nilai	25			34,35	34,35	71.569.695.338		APBD	sda
6	Perbedaan skor literasi	Nilai	2,76			3,77	3,77	71.569.695.338		APBD	sda
7	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,26			1,59	1,59	71.569.695.338		APBD	sda
8	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,52			67,72	67,72	1.865.384.134		APBD	sda
9	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	60,92			66,92	66,92	1.865.384.134		APBD	sda
10	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53,24			55,77	55,77	1.865.384.134		APBD	sda
11	Kecukupan formasi guru ASN	%	95,10			98	98	67.508.353.912		APBD	sda
12	Indeks Distribusi Guru	%	0,51			0,50	0,50	67.508.353.912		APBD	sda
13	Proporsi PTK bersertifikat	%	38,11			75	75	67.508.353.912		APBD	sda
14	Proporsi PTK penggerak	%	1,38			1,48	1,48	67.508.353.912		APBD	sda
15	Pengalaman pelatihan guru	%	9,94			25	25	1.569.263.291		APBD	sda
	SMK		23.135	27.772	27.772						Dinas Dikbud
1	Angka partisipasi kasar	%	110,36			100	100	312.593.794.437		APBD	sda

2	Angka partisipasi sekolah	%	98,50			98,65	98,65	312.593.794.437		APBD	sda
3	Angka partisipasi murni	%	98,04			98,15	98,15	312.593.794.437		APBD	sda
4	Kemampuan literasi	Nilai	28,37			27,87	27,87	72.232.916.921		APBD	sda
5	Kemampuan numerasi	Nilai	22			23,92	23,92	72.232.916.921		APBD	sda
6	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	34,01			38	38	1.990.036.239		APBD	sda
7	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	100			100	100	1.990.036.239		APBD	sda
8	Perbedaan skor literasi	Nilai	1,84			2,91	2,91	72.232.916.921		APBD	sda
9	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,34			1,15	1,15	72.232.916.921		APBD	sda
10	Indeks iklim keamanan	Nilai	64,12			62,58	62,58	792.175.384		APBD	sda
11	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	57,76			63,04	63,04	792.175.384		APBD	sda
12	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	51,10			54,30	54,30	792.175.384		APBD	sda
13	Kecukupan formasi guru ASN	%	79,75			91,89	91,89	67.508.353.912		APBD	sda
14	Indeks Distribusi Guru	%	0,51			0,42	0,42	67.508.353.912		APBD	sda
15	Proporsi PTK bersertifikat	%	30,43			72,17	72,17	67.508.353.912		APBD	sda
16	Proporsi PTK penggerak	%	0,06			0,12	0,12	67.508.353.912		APBD	sda
17	Pengalaman pelatihan guru	%	7,19			8,81	8,81	1.138.421.886		APBD	sda
2)	Pendidikan Khusus		409	605	605						Dinas Dikbud
1	Angka partisipasi sekolah	%	86,83			88,83	88,83	45.680.885.781		APBD	sda
2	Kemampuan literasi	Nilai	49,81			43,66	43,66	222.267.021		APBD	sda
3	Kemampuan numerasi	Nilai	37,37			30,51	30,51	115.383.352.230		APBD	sda
4	Perbedaan skor literasi	Nilai	7			3,69	3,69	115.383.352.230		APBD	sda
5	Perbedaan skor numerasi	Nilai	5,38			2,94	2,94	115.383.352.230		APBD	sda
6	Indeks iklim keamanan	Nilai	73,21			69,88	69,88	179.200.469		APBD	sda
7	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	60,37			62,96	62,96	179.200.469		APBD	sda
8	Indeks inklusivitas	Nilai	56,66			56,76	56,76	179.200.469		APBD	sda
9	Kecukupan formasi guru ASN	%	59,84			76,39	76,39	67.508.353.912		APBD	sda
10	Indeks Distribusi Guru	%	0,43			0,61	0,61	67.508.353.912		APBD	sda
11	Proporsi PTK bersertifikat	%	21,74			68,91	68,91	67.508.353.912		APBD	sda
12	Proporsi PTK penggerak	%	NA			75	75	67.508.353.912		APBD	sda
13	Pengalaman pelatihan guru	%	4,08			61,79	61,79	46.371.639.434		APBD	sda
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pendidikan Menengah SMA		29.834	37.657	37.657						Dinas Dikbud
1	Angka partisipasi kasar	%	110,36			100	100	419.832.527.904		APBD	sda
2	Angka partisipasi sekolah	%	98,50			98,75	98,75	419.832.527.904		APBD	sda
3	Angka partisipasi murni	%	98,04			98,20	98,20	419.832.527.904		APBD	sda
4	Kemampuan literasi	Nilai	41,19			43	43	82.305.149.638		APBD	sda
5	Kemampuan numerasi	Nilai	25			34,85	34,85	82.305.149.638		APBD	sda
6	Perbedaan skor literasi	Nilai	2,76			3,82	3,82	82.305.149.638		APBD	sda
7	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,26			1,61	1,61	82.305.149.638		APBD	sda
8	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,52			67,77	67,77	2.145.191.754		APBD	sda
9	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	60,92			66,97	66,97	2.145.191.754		APBD	sda

10	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53,24			55,82	55,82	2.145.191.754		APBD	sda
11	Kecukupan formasi guru ASN	%	95,10			99	99	77.634.606.999		APBD	sda
12	Indeks Distribusi Guru	%	0,51			0,55	0,55	77.634.606.999		APBD	sda
13	Proporsi PTK bersertifikat	%	38,11			88	88	77.634.606.999		APBD	sda
14	Proporsi PTK penggerak	%	1,38			1,53	1,53	77.634.606.999		APBD	sda
15	Pengalaman pelatihan guru	%	9,94			30	30	1.804.652.785		APBD	sda
	SMK		23.952	30.549	30.549						Dinas Dikbud
1	Angka partisipasi kasar	%	110,36			100	100	359.482.863.603		APBD	sda
2	Angka partisipasi sekolah	%	98,50			98,75	98,75	359.482.863.603		APBD	sda
3	Angka partisipasi murni	%	98,04			98,20	98,20	359.482.863.603		APBD	sda
4	Kemampuan literasi	Nilai	28,37			27,92	27,92	83.067.854.459		APBD	sda
5	Kemampuan numerasi	Nilai	22			23,97	23,97	83.067.854.459		APBD	sda
6	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	34,01			38,50	38,50	2.288.541.675		APBD	sda
7	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	100			100	100	2.288.541.675		APBD	sda
8	Perbedaan skor literasi	Nilai	1,84			2,93	2,93	83.067.854.459		APBD	sda
9	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,34			1,17	1,17	83.067.854.459		APBD	sda
10	Indeks iklim keamanan	Nilai	64,12			62,63	62,63	911.001.692		APBD	sda
11	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	57,76			63,54	63,54	911.001.692		APBD	sda
12	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	51,10			54,80	54,80	911.001.692		APBD	sda
13	Kecukupan formasi guru ASN	%	79,75			95,93	95,93	77.634.606.999		APBD	sda
14	Indeks Distribusi Guru	%	0,51			0,47	0,47	77.634.606.999		APBD	sda
15	Proporsi PTK bersertifikat	%	30,43			86,08	86,08	77.634.606.999		APBD	sda
16	Proporsi PTK penggerak	%	0,06			0,14	0,14	77.634.606.999		APBD	sda
17	Pengalaman pelatihan guru	%	7,19			9,31	9,31	1.309.185.169		APBD	sda
2)	Pendidikan Khusus		409	666	666						Dinas Dikbud
1	Angka partisipasi sekolah	%	86,83			89,83	89,83	52.533.018.648		APBD	sda
2	Kemampuan literasi	Nilai	49,81			43,71	43,71	255.607.074		APBD	sda
3	Kemampuan numerasi	Nilai	37,37			30,56	30,56	132.690.855.064		APBD	sda
4	Perbedaan skor literasi	Nilai	7			3,71	3,71	132.690.855.064		APBD	sda
5	Perbedaan skor numerasi	Nilai	5,38			2,95	2,95	132.690.855.064		APBD	sda
6	Indeks iklim keamanan	Nilai	73,21			69,93	69,93	206.080.540		APBD	sda
7	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	60,37			62,98	62,98	206.080.540		APBD	sda
8	Indeks inklusivitas	Nilai	56,66			56,81	56,81	206.080.540		APBD	sda
9	Kecukupan formasi guru ASN	%	59,84			88,29	88,29	77.634.606.999		APBD	sda
10	Indeks Distribusi Guru	%	0,43			0,66	0,66	77.634.606.999		APBD	sda
11	Proporsi PTK bersertifikat	%	21,74			84,45	84,45	77.634.606.999		APBD	sda
12	Proporsi PTK penggerak	%	NA			100	100	77.634.606.999		APBD	sda
13	Pengalaman pelatihan guru	%	4,08			81,03	81,03	53.327.385.349		APBD	sda
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pendidikan Menengah SMA		29.834	41.422	41.422						Dinas Dikbud
1	Angka partisipasi kasar	%	110,36			100	100	482.807.407.090		APBD	sda

2	Angka partisipasi sekolah	%	98,50			98,80	98,80	482.807.407.090		APBD	sda
3	Angka partisipasi murni	%	98,04			98,25	98,25	482.807.407.090		APBD	sda
4	Kemampuan literasi	Nilai	41,19			44	44	94.650.922.084		APBD	sda
5	Kemampuan numerasi	Nilai	25			35,35	35,35	94.650.922.084		APBD	sda
6	Perbedaan skor literasi	Nilai	2,76			3,87	3,87	94.650.922.084		APBD	sda
7	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,26			1,63	1,63	94.650.922.084		APBD	sda
8	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,52			67,82	67,82	2.466.970.517		APBD	sda
9	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	60,92			67,02	67,02	2.466.970.517		APBD	sda
10	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53,24			55,87	55,87	2.466.970.517		APBD	sda
11	Kecukupan formasi guru ASN	%	95,10			100	100	89.279.798.048		APBD	sda
12	Indeks Distribusi Guru	%	0,51			0,60	0,60	89.279.798.048		APBD	sda
13	Proporsi PTK bersertifikat	%	38,11			100	100	89.279.798.048		APBD	sda
14	Proporsi PTK penggerak	%	1,38			1,58	1,58	89.279.798.048		APBD	sda
15	Pengalaman pelatihan guru	%	9,94			35	35	2.075.350.703		APBD	sda
	SMK		23.135	33.604	33.604						Dinas Dikbud
1	Angka partisipasi kasar	%	110,36			100	100	413.405.293.143		APBD	sda
2	Angka partisipasi sekolah	%	98,50			98,80	98,80	413.405.293.143		APBD	sda
3	Angka partisipasi murni	%	98,04			98,25	98,25	413.405.293.143		APBD	sda
4	Kemampuan literasi	Nilai	28,37			27,97	27,97	95.528.032.628		APBD	sda
5	Kemampuan numerasi	Nilai	22			24,02	24,02	95.528.032.628		APBD	sda
6	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	34,01			39	39	2.631.822.926		APBD	sda
7	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	100			100	100	2.631.822.926		APBD	sda
8	Perbedaan skor literasi	Nilai	1,84			2,95	2,95	95.528.032.628		APBD	sda
9	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,34			1,19	1,19	95.528.032.628		APBD	sda
10	Indeks iklim keamanan	Nilai	64,12			62,68	62,68	1.047.651.945		APBD	sda
11	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	57,76			64,04	64,04	1.047.651.945		APBD	sda
12	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	51,10			55,30	55,30	1.047.651.945		APBD	sda
13	Kecukupan formasi guru ASN	%	79,75			100	100	89.279.798.048		APBD	sda
14	Indeks Distribusi Guru	%	0,51			0,52	0,52	89.279.798.048		APBD	sda
15	Proporsi PTK bersertifikat	%	30,43			100	100	89.279.798.048		APBD	sda
16	Proporsi PTK penggerak	%	0,06			0,16	0,16	89.279.798.048		APBD	sda
17	Pengalaman pelatihan guru	%	7,19			9,81	9,81	1.505.562.945		APBD	sda
2)	Pendidikan Khusus		409	732	732						Dinas Dikbud
1	Angka partisipasi sekolah	%	86,83			90,83	90,83	60.412.971.446		APBD	sda
2	Kemampuan literasi	Nilai	49,81			43,76	43,76	293.948.135		APBD	sda
3	Kemampuan numerasi	Nilai	37,37			30,61	30,61	152.594.483.324		APBD	sda
4	Perbedaan skor literasi	Nilai	7			3,73	3,73	152.594.483.324		APBD	sda
5	Perbedaan skor numerasi	Nilai	5,38			2,98	2,98	152.594.483.324		APBD	sda
6	Indeks iklim keamanan	Nilai	73,21			69,98	69,98	236.992.621		APBD	sda
7	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	60,37			63,03	63,03	236.992.621		APBD	sda
8	Indeks inklusivitas	Nilai	56,66			56,86	56,86	236.992.621		APBD	sda
9	Kecukupan formasi guru ASN	%	59,84			100	100	89.279.798.048		APBD	sda
10	Indeks Distribusi Guru	%	0,43			0,71	0,71	89.279.798.048		APBD	sda
11	Proporsi PTK bersertifikat	%	21,74			100	100	89.279.798.048		APBD	sda
12	Proporsi PTK penggerak	%	NA			-	-	89.279.798.048		APBD	sda
13	Pengalaman pelatihan guru	%	4,08			100	100	61.326.493.151		APBD	sda

Tabel 3.2 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah	Orang	1.934.138	31.485	31.485			3.853.836.004		APBD	Dinas Kesehatan
1	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Orang	-			31.485	31.485	134.910.354			
2	Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)	Orang	-			31.485	31.485	1.362.985.650			
3	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	Orang	-			31.485	31.485	125.940.000			
4	Dokter	Orang	2.295			94	94	260.400.000			
5	Perawat	Orang	11.867			283	283	778.400.000			
6	Bidan	Orang	7.700			189	189	798.000.000			
7	Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dll	Orang	3.218			32	32	81.200.000			
8	Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	Orang	35			7	7	16.800.000			
9	Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	Orang	1.794			29	29	78.400.000			
10	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	711			7	7	16.800.000			
11	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang	1.000			-	-	-			
12	Petugas Kesehatan	Orang	5			-	-	-			
2)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah	Orang	1.916.490	17.593	17.593			1.428.965.578		APBD	Dinas Kesehatan
1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	Orang				2.639	2.639	1.007.946.953			
2	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	Orang	958.245			2.639	2.639	79.168.500			
3	Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	Unit	574.947			2.639	2.639				
4	Tempat sampah biologis	Orang	574.947			2.639	2.639	62.015.325			
5	Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	Orang	1.916.490			2.639	2.639	2.638.950			
6	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Orang				3.000	3.000	20.500.000			
7	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Orang				265	265	60.695.850			
8	Dokter	Orang	2.295			11	11	30.800.000			
9	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	500			6	6	16.800.000			
10	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	564			6	6	16.800.000			
11	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	25			6	6	16.800.000			
12	Tenaga Laboratorium	Orang	1.786			6	6	16.800.000			
13	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	711			6	6	16.800.000			
14	Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	500			29	29	81.200.000			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah		1.934.138	32.579	32.579			3.707.407.396		APBD	Dinas Kesehatan
1	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Orang				32.579	32.579	136.746.486			
2	Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)	Orang				32.579	32.579	1.410.344.910			
3	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	Orang				32.579	32.579	130.316.000			
4	Dokter	Orang	2.295			98	98	260.400.000			
5	Perawat	Orang	11.867			293	293	778.400.000			
6	Bidan	Orang	7.700			195	195	798.000.000			
7	Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dll	Orang	3.218			32	32	81.200.000			
8	Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	Orang	35			7	7	16.800.000			
9	Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	Orang	1.794			30	30	78.400.000			
10	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	711			7	7	16.800.000			
11	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang	1.000			1.000	1.000	409.645.000			
12	Petugas kesehatan	Orang	5			5	5	89.050.000			
2)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah		1.916.490	18.205	18.205			1.454.343.088		APBD	Dinas Kesehatan
1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	Orang				18.205	18.205	1.043.009.963			
2	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	Orang	958.245			18.205	18.205	81.922.500			
3	Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	Orang	574.947			18.205	18.205				
4	Tempat sampah biologis	Unit	574.947			18.205	18.205	64.172.625			
5	Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	Orang	1.916.490			18.205	18.205	2.730.750			
6	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Orang				3.000	3.000	20.500.000			
7	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Orang				265	265	62.807.250			
8	Dokter	Orang	2.295			11	11	30.800.000			
9	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	500			6	6	16.800.000			
10	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	564			6	6	16.800.000			
11	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	25			6	6	16.800.000			
12	Tenaga Laboratorium	Orang	1.786			6	6	16.800.000			
13	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	711			6	6	16.800.000			
14	Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	500			29	29	81.200.000			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah		1.934.138	33.673	33.673			3.760.978.788		APBD	Dinas Kesehatan
1	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Orang				33.673	33.673	138.582.618			
2	Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)	Orang				33.673	33.673	1.457.704.170			
3	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	Orang				33.673	33.673	134.692.000			
4	Dokter	Orang	2.295			101	101	260.400.000			
5	Perawat	Orang	11.867			303	303	778.400.000			
6	Bidan	Orang	7.700			202	202	798.000.000			
7	Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dll	Orang	3.218			32	32	81.200.000			
8	Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	Orang	35			7	7	16.800.000			
9	Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	Orang	1.794			30	30	78.400.000			
10	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	711			7	7	16.800.000			
11	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang	1.000			1.000	1.000	409.645.000			
12	Petugas kesehatan	Orang	5			5	5	89.050.000			
2)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah		1.916.490	18.816	18.816			1.541.251.680		APBD	Dinas Kesehatan
1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	Orang				18.816	18.816	1.078.015.680			
2	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	Orang	958.245			18.816	18.816	84.672.000			
3	Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	Orang	574.947			18.816	18.816				
4	Tempat sampah biologis	Unit	574.947			18.816	18.816	66.326.400			
5	Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperluka	Orang	1.916.490			18.816	18.816	2.822.400			
6	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Orang				3.000	3.000	20.500.000			
7	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Orang				280	280	64.915.200			
8	Dokter	Orang	2.295			12	12	33.600.000			
9	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	500			7	7	19.600.000			
10	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	564			7	7	19.600.000			
11	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	25			7	7	19.600.000			
12	Tenaga Laboratorium	Orang	1.786			7	7	19.600.000			
13	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	711			7	7	19.600.000			
14	Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	500			33	33	92.400.000			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah		1.934.138	34.767	34.767			3.662.792.226		APBD	Dinas Kesehatan
1	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Orang				34.767	34.767	140.418.751			
2	Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)	Orang				34.767	34.767	1.353.305.475			
3	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	Orang				34.767	34.767	139.068.000			
4	Dokter	Orang	2.295			104	104	260.400.000			
5	Perawat	Orang	11.867			313	313	778.400.000			
6	Bidan	Orang	7.700			209	209	798.000.000			
7	Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dll	Orang	3.218			32	32	81.200.000			
8	Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	Orang	35			7	7	16.800.000			
9	Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	Orang	1.794			30	30	78.400.000			
10	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	711			7	7	16.800.000			
11	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang	1.000			1.000	1.000	409.645.000			
12	Petugas kesehatan	Orang	5			5	5	89.050.000			
2)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah		1.916.490	19.427	19.427			1.583.360.273		APBD	Dinas Kesehatan
1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	Orang				19.427	19.427	1.113.021.398			
2	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	Orang	958.245			19.427	19.427	87.421.500			
3	Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	Orang	574.947			19.427	19.427				
4	Tempat sampah biologis	Unit	574.947			19.427	19.427	68.480.175			
5	Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperluka	Orang	1.916.490			19.427	19.427	2.914.050			
6	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Orang				3.000	3.000	20.500.000			
7	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Orang				290	290	67.023.150			
8	Dokter	Orang	2.295			12	12	33.600.000			
9	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	500			7	7	19.600.000			
10	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	564			7	7	19.600.000			
11	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	25			7	7	19.600.000			
12	Tenaga Laboratorium	Orang	1.786			7	7	19.600.000			
13	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	711			7	7	19.600.000			
14	Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	500			33	33	92.400.000			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah		1.934.138	35.861	35.861			3.868.121.573		APBD	Dinas Kesehatan
1	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Orang				35.861	35.861	142.254.883			
2	Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)	Orang				35.861	35.861	1.552.422.690			
3	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	Orang				35.861	35.861	143.444.000			
4	Dokter	Orang	2.295			108	108	260.400.000			
5	Perawat	Orang	11.867			323	323	778.400.000			
6	Bidan	Orang	7.700			215	215	798.000.000			
7	Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dll	Orang	3.218			32	32	81.200.000			
8	Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	Orang	35			7	7	16.800.000			
9	Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	Orang	1.794			30	30	78.400.000			
10	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	711			7	7	16.800.000			
11	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang	1.000			1.000	1.000	409.645.000			
12	Petugas kesehatan	Orang	5			5	5	89.050.000			
2)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah		1.916.490	20.039	20.039			1.625.537.783		APBD	Dinas Kesehatan
1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	Orang				20.039	20.039	1.148.084.408			
2	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	Orang	958.245			20.039	20.039	90.175.500			
3	Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	Orang	574.947			20.039	20.039				
4	Tempat sampah biologis	Unit	574.947			20.039	20.039	70.637.475			
5	Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperluka	Orang	1.916.490			20.039	20.039	3.005.850			
6	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Orang				3.000	3.000	20.500.000			
7	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Orang				300	300	69.134.550			
8	Dokter	Orang	2.295			13	13	33.600.000			
9	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	500			7	7	19.600.000			
10	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	564			7	7	19.600.000			
11	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	25			7	7	19.600.000			
12	Tenaga Laboratorium	Orang	1.786			7	7	19.600.000			
13	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	711			7	7	19.600.000			
14	Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	500			34	34	92.400.000			

Tabel 3.3 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota										
1	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	liter/ detik									
2	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau) kabupaten/kota	liter/ detik									
3	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Kab/ Kota				8	8	24.402.000.000		APBD, DBHCHT	DPUPR NTB
2)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota										
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga									
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga									
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga									
4	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Kab/ Kota									
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota										
1	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	liter/ detik									
2	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan	liter/ detik									

	elayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau) kabupaten/kota										
3	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Kab/ Kota				10	10	44.546.000.000		APBD, DBHCHT	DPUPR NTB
2)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota										
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga									
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga									
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga									
4	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Kab/ Kota				2	2	3.600.000		APBD	DPUPR NTB
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota										
1	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	liter/ detik									
2	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau) kabupaten/kota	liter/ detik									
3	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Kab/ Kota				8	8	35.000.000.000		APBD, DBHCHT	DPUPR NTB
2)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota										
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga									
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga									
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga									

4	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Kab/Kota				3	3	5.000.000		APBD	DPUPR NTB
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota										
1	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	liter/detik									
2	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau) kabupaten/kota	liter/detik									
3	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Kab/Kota				8	8	35.000.000.000		APBD, DBHCHT	DPUPR NTB
2)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota										
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga									
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga									
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga									
4	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Kab/Kota				3	3	5.000.000		APBD	DPUPR NTB
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota										
1	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	liter/detik									
2	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan	liter/detik									

	elayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau) kabupaten/kota										
3	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Kab/ Kota				8	8	35.000.000.000		APBD, DBHCHT	DPUPR NTB
2)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota										
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga									
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga									
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga									
4	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Kab/ Kota				3	3	5.000.000		APBD	DPUPR NTB

Tabel 3.4 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi			20	20			77.223.800			
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah									
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah				5	5	77.223.800		APBD	DISPERKIM
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah									
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	Rumah									
2)	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi										
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah									
2	Subsidi uang sewa	Rumah									
3	Penyediaan rumah layak huni	Rumah									
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi			120	120			1.100.000.000			
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah									
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah				20	20	550.000.000		APBD	DISPERKIM
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah				10	10	550.000.000		APBD	DISPERKIM
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	Rumah									
2)	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi										
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah									
2	Subsidi uang sewa	Rumah									
3	Penyediaan rumah layak huni	Rumah									
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana			120	120			1.100.000.000			

	Provinsi										
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah									
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah				20	20	550.000.000		APBD	DISPERKIM
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah				10	10	550.000.000		APBD	DISPERKIM
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	Rumah									
2)	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi										
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah									
2	Subsidi uang sewa	Rumah									
3	Penyediaan rumah layak huni	Rumah									
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi			120	120			1.100.000.000			
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah									
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah				20	20	550.000.000		APBD	DISPERKIM
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah				10	10	550.000.000		APBD	DISPERKIM
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	Rumah									
2)	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi										
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah									
2	Subsidi uang sewa	Rumah									
3	Penyediaan rumah layak huni	Rumah									
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi			120	120			1.100.000.000			
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah									
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah				20	20	550.000.000		APBD	DISPERKIM
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah				10	10	550.000.000		APBD	DISPERKIM
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	Rumah									
2)	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi										
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah									
2	Subsidi uang sewa	Rumah									
3	Penyediaan rumah layak huni	Rumah									

Tabel 3.5 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi		66	66	66			1.920.000.000		APBD	Satpol PP NTB
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0			5	5	10.000.000		APBD	sda
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	Orang	0			5	5	10.000.000		APBD	sda
3	Standar operasional prosedur Satpol PP	Dokumen	7			7	7	5.000.000		APBD	sda
4	Standar sarana prasarana Satpol PP	Unit	35			38	38	1.700.000.000		APBD	sda
5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	Orang	11			12	12	195.000.000		APBD	sda
6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Dokumen				5	5			APBD	sda
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi		66	67	67			2.135.000.000		APBD	Satpol PP NTB
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0			5	5	10.000.000		APBD	sda
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	Orang	0			5	5	10.000.000		APBD	sda
3	Standar operasional prosedur Satpol PP	Dokumen	7			7	7	5.000.000		APBD	sda
4	Standar sarana prasarana Satpol PP	Unit	35			41	41	1.900.000.000		APBD	sda
5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	Orang	11			13	13	200.000.000		APBD	sda
6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Dokumen				5	5	10.000.000		APBD	sda
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana

			2022	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi		66	68	68			2.340.000.000		APBD	Satpol PP NTB
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0			5	5	10.000.000		APBD	sda
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	Orang	0			5	5	10.000.000		APBD	sda
3	Standar operasional prosedur Satpol PP	Dokumen	7			7	7	5.000.000		APBD	sda
4	Standar sarana prasarana Satpol PP	Unit	35			41	41	2.100.000.000		APBD	sda
5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	Orang	11			13	13	205.000.000		APBD	sda
6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Dokumen				5	5	10.000.000		APBD	sda
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi		66	69	69			2.545.000.000		APBD	Satpol PP NTB
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0			5	5	10.000.000		APBD	sda
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	Orang	0			5	5	10.000.000		APBD	sda
3	Standar operasional prosedur Satpol PP	Dokumen	7			7	7	5.000.000		APBD	sda
4	Standar sarana prasarana Satpol PP	Unit	35			44	44	2.300.000.000		APBD	sda
5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	Orang	11			14	14	210.000.000		APBD	sda
6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Dokumen				5	5	10.000.000		APBD	sda
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi		66	70	70			2.750.000.000		APBD	Satpol PP

											NTB
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	<i>Orang</i>	0			5	5	10.000.000		APBD	sda
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	<i>Orang</i>	0			5	5	10.000.000		APBD	sda
3	Standar operasional prosedur Satpol PP	<i>Dokumen</i>	7			7	7	5.000.000		APBD	sda
4	Standar sarana prasarana Satpol PP	<i>Unit</i>	35			45	45	2.500.000.000		APBD	sda
5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	<i>Orang</i>	11			15	15	215.000.000		APBD	sda
6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	<i>Dokumen</i>				5	5	10.000.000		APBD	sda

Tabel 3.6 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Sosial			100	100			2.390.153.500		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				100	100	1.414.600.000			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				100	100	77.000.000			sda
3	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				5	5	30.000.000			sda
4	Penyediaan Alat Bantu	Orang				10	10	648.175.000			sda
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				10	10	120.862.500			sda
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				5	5	51.216.000			sda
7	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari	Orang				7	7	3.300.000			sda
8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				100	100	0			sda
9	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan / Kesehatan Dasar	Orang				0	0	0			sda
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				1	1	15.000.000			sda
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				1	1	15.000.000			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Dalam panti	Orang				1	1	15.000.000			sda
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Sosial			254	254			7.154.123.791		APBD	DINAS SOSIAL
1	Pengasuhan	Orang				2	2	99.000.000			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				254	254	133.100.000			sda
3	Penyediaan Permakanan	Orang				254	254	1.732.698.000			sda
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				25	25	62.585.281			sda
5	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				15	15	98.386.750			sda
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				10	10	798.323.460			sda
7	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari	Orang				8	8	15.000.000			sda
8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				254	254	0			sda
9	Penyediaan Akses ke Layanan Pendidikan	Orang				5	5	346.632.000			sda
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				1	1	30.000.000			sda
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				1	1	33.000.000			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam panti	Orang				1	1	3.805.398.300			sda
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial			130	130			2.604.605.118		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				130	130	1.891.389.500			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				130	130	96.026.700			sda

3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				10	10	166.215.918			sda
4	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				12	12	193.600.000			sda
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				18	18	142.098.000			sda
6	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari	Orang				6	6	11.880.000			sda
7	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				130	130	0			sda
8	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang				0	0	0			sda
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				1	1	20.000.000			sda
10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				1	1	20.000.000			sda
11	Pemulasaraan	Orang				1	1	43.395.000			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam panti							20.000.000			sda
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial			75	75			1.113.621.836		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				75	75	522.637.500			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				75	75	38.115.000			sda
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				12	12	3.950.716			sda
4	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				15	15	9.247.370			sda
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				5	5	74.250.000			sda
6	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari_hari	Orang				5	5	0			sda
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang				2	2	418.921.250			sda
8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				75	75	0			sda
9	Pemulangan ke Daerah Asal	Orang				1	1	15.000.000			sda
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				0	0	0			sda
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				0	0	0			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam panti	Orang				1	1	16.500.000			sda
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			10.580	10.580					APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				0	0	423.900.000			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				0	0	349.000.000			sda
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit				300	300	99.000.000			sda
4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang				3	3	383.570.000			sda
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang				7	7	489.566.000			sda
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Sosial			100	100			2.629.168.850		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				100	100	1.556.060.000			sda

2	Penyediaan Sandang	Orang				100	100	84.700.000			sda
3	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				5	5	33.000.000			sda
4	Penyediaan Alat Bantu	Orang				10	10	712.992.500			sda
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				10	10	132.948.750			sda
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				5	5	56.337.600			sda
7	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari	Orang				7	7	3.630.000			sda
8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				100	100	0			sda
9	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan / Kesehatan Dasar	Orang				0	0	0			sda
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				1	1	16.500.000			sda
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				1	1	16.500.000			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Dalam panti	Orang				1	1	16.500.000			sda
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Sosial			254	254			7.869.536.170		APBD	DINAS SOSIAL
1	Pengasuhan	Orang				2	2	108.900.000			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				254	254	146.410.000			sda
3	Penyediaan Permakanan	Orang				254	254	1.905.967.800			sda
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				25	25	68.843.809			sda
5	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				15	15	108.225.425			sda
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				10	10	878.155.806			sda
7	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari	Orang				8	8	16.500.000			sda
8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				254	254	0			sda
9	Penyediaan Akses ke Layanan Pendidikan	Orang				5	5	381.295.200			sda
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				1	1	33.000.000			sda
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				1	1	3			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam panti	Orang				1	1	4.185.938.130			sda
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial			130	130			2.865.065.630		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				130	130	2.080.528.450			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				130	130	105.629.370			sda
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				10	10	182.837.510			sda
4	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				12	12	212.960.000			sda
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				18	18	156.307.800			sda
6	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari	Orang				6	6	13.068.000			sda
7	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				130	130	0			sda
8	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang				0	0	0			sda
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				1	1	22.000.000			sda
10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				1	1	22.000.000			sda
11	Pemulasaraan	Orang				1	1	47.734.500			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam panti	Orang						22.000.000			sda
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial			75	75			1.224.984.020		APBD	DINAS SOSIAL

1	Penyediaan Permakanan	Orang				75	75	574.901.250			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				75	75	41.926.500			sda
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				12	12	4.345.788			sda
4	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				15	15	10.172.107			sda
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				5	5	81.675.000			sda
6	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari_hari	Orang				5	5	0			sda
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang				2	2	460.813.375			sda
8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				75	75	0			sda
9	Pemulangan ke Daerah Asal	Orang				1	1	16.500.00			sda
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				0	0	0			sda
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				0	0	0			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam panti	Orang				1	1	18.150.000			sda
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			10.580	10.580					APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				0	0	466.290.000			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				0	0	383.900.000			sda
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit				300	300	108.900.000			sda
4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang				3	3	383.570.000			sda
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang				7	7	489.566.000			sda
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Sosial			100	100			2.892.085.735		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				100	100	1.711.666.000			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				100	100	93.170.000			sda
3	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				5	5	36.300.000			sda
4	Penyediaan Alat Bantu	Orang				10	10	784.291.750			sda
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				10	10	146.243.625			sda
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				5	5	61.971.360			sda
7	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari	Orang				7	7	3.993.000			sda
8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				100	100	0			sda
9	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan / Kesehatan Dasar	Orang				0	0	0			sda
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				1	1	18.150.000			sda
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				1	1	18.150.000			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Dalam panti	Orang				1	1	18.150.000			sda
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Sosial			254	254			8.656.489.787		APBD	DINAS SOSIAL

1	Pengasuhan	Orang				2	2	119.790.000			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				254	254	161.051.000			sda
3	Penyediaan Permakanan	Orang				254	254	2.096.564.580			sda
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				25	25	75.728.190			sda
5	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				15	15	119.047.968			sda
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				10	10	965971387			sda
7	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari	Orang				8	8	18.150.000			sda
8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				254	254	0			sda
9	Penyediaan Akses ke Layanan Pendidikan	Orang				5	5	419.424.720			sda
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				1	1	36.300.000			sda
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				1	1	39.930.000			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam panti	Orang				1	1	4.604.531.943			sda
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial			130	130			3.151.572.193		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				130	130	2.288.581.295			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				130	130	116.192.307			sda
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				10	10	201.121.261			sda
4	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				12	12	234.256.000			sda
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				18	18	171.938.580			sda
6	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari	Orang				6	6	14.374.800			sda
7	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				130	130	0			sda
8	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang				0	0	0			sda
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				1	1	24.200.000			sda
10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				1	1	24.200.000			sda
11	Pemulasaraan	Orang				1	1	52.507.950			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam panti	Orang				1	1	24.200.000			sda
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial			75	75			1.347.482.422		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				75	75	632.391.375			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				75	75	46.119.150			sda
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				12	12	4.780.366			sda
4	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				15	15	11.189.318			sda
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				5	5	89.842.500			sda
6	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari_hari	Orang				5	5	18.150.000			sda
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang				2	2	560.894.713			sda
8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				75	75	0			sda
9	Pemulangan ke Daerah Asal	Orang				1	1	18.150.000			sda
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				0	0	0			sda
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				0	0	0			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam panti	Orang				1	1	19.965.000			sda
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat			10.580	10.580			2.015.448.600		APBD	DINAS

	Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota										SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				0	0	512.919.000			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				0	0	422.290.000			sda
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit				300	300	119.790.000			sda
4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang				3	3	421.927.000			sda
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang				7	7	538.522.000			sda
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Pant Sosial			100	100			3.181.294.309		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				100	100	1.882.832.600			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				100	100	102.487.000			sda
3	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				5	5	39.930.000			sda
4	Penyediaan Alat Bantu	Orang				10	10	862.720.925			sda
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				10	10	160.867.988			sda
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				5	5	68.168.496			sda
7	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari	Orang				7	7	4.392.300			sda
8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				100	100	0			sda
9	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan / Kesehatan Dasar	Orang				0	0	0			sda
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				1	1	19.965.000			sda
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				1	1	19.965.000			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Dalam pant	Orang				1	1	19.965.000			sda
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant Sosial			254	254			9.522.138.766		APBD	DINAS SOSIAL
1	Pengasuhan	Orang				2	2	131.769.000			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				254	254	177.156.100			sda
3	Penyediaan Permakanan	Orang				254	254	2.306.221.038			sda
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				25	25	83.301.009			sda
5	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				15	15	130.952.764			sda
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				10	10	1.062.568.525			sda
7	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari	Orang				8	8	19.965.000			sda
8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				254	254	0			sda
9	Penyediaan Akses ke Layanan Pendidikan	Orang				5	5	461.367.192			sda
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				1	1	39.930.000			sda
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				1	1	43.923.000			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam pant	Orang				1	1	5.064.985.137			sda
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pant Sosial			130	130			3.466.729.412		APBD	DINAS

											SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				130	130	2.517.439.425			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				130	130	127.811.538			sda
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				10	10	221.233.387			sda
4	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				12	12	257.681.600			sda
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				18	18	189.132.438			sda
6	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari	Orang				6	6	15.812.280			sda
7	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				130	130	0			sda
8	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang				0	0	0			sda
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				1	1	26.620.000			sda
10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				1	1	26.520.000			sda
11	Pemulasaraan	Orang				1	1	57.758.745			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam panti	Orang						26.620.000			sda
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial			75	75			1.482.230.664		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				75	75	695.630.513			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				75	75	50.731.065			sda
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				12	12	5.258.403			sda
4	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				15	15	12.308.249			sda
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				5	5	98.826.750			sda
6	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari_hari	Orang				5	5	19.965.000			sda
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang				2	2	557.584.184			sda
8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				75	75	0			sda
9	Pemulangan ke Daerah Asal	Orang				1	1	19.965.000			sda
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				0	0	0			sda
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				0	0	0			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam panti	Orang				1	1	21.961.500			sda
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			10.580	10.580			2.216.993.460		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				0	0	564.210.900			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				0	0	464.519.000			sda
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit				300	300	131.769.000			sda
4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang				3	3	464.119.700			sda
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang				7	7	592.374.860			sda
NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N) 2022	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi										
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti			100	100			3.499.423.739		APBD	DINAS

	Sosial										SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				100	100	2.071.115.860			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				100	100	112.735.700			sda
3	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				5	5	43.923.000			sda
4	Penyediaan Alat Bantu	Orang				10	10	948.993.018			sda
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				10	10	176.954.786			sda
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				5	5	74.985.346			sda
7	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari	Orang				7	7	4.831.530			sda
8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				100	100	0			sda
9	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan / Kesehatan Dasar	Orang				0	0	0			sda
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				1	1	21.961.500			sda
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				1	1	21.961.500			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Dalam panti	Orang				1	1	21.961.500			sda
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Sosial				254	254		10.474.352.642		APBD	DINAS SOSIAL
1	Pengasuhan	Orang				2	2	144.945.900			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				254	254	194.871.710			sda
3	Penyediaan Permakanan	Orang				254	254	2.536.843.142			sda
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				25	25	91.631.110			sda
5	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				15	15	144.048.041			sda
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				10	10	1.168.825.378			sda
7	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari	Orang				8	8	21.961.500			sda
8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				254	254	0			sda
9	Penyediaan Akses ke Layanan Pendidikan	Orang				5	5	507.503.911			sda
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				1	1	43.923.000			sda
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				1	1	48.315.300			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam panti	Orang				1	1	5.571.483.651			sda
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial				130	130		3.813.402.353		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				130	130	2.769.183.367			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				130	130	140.592.691			sda
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				10	10	243.356.726			sda
4	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				12	12	283.449.760			sda
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				18	18	208.045.682			sda
6	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari	Orang				6	6	17.393.508			sda
7	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				130	130	0			sda
8	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang				0	0	0			sda
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				1	1	29.282.000			sda
10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				1	1	29.282.000			sda
11	Pemulasaraan	Orang				1	1	63.534.620			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam panti	Orang				1	1	29.282.000			sda

4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial			75	75			1.630.453.730		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				75	75	765.193.564			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				75	75	55.804.172			sda
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				12	12	5.784.243			sda
4	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Unit				15	15	13.539.074			sda
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				5	5	108.709.425			sda
6	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari_hari	Orang				5	5	21.961.500			sda
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang				2	2	613.342.602			sda
8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				75	75	0			sda
9	Pemulangan ke Daerah Asal	Orang				1	1	21.961.500			sda
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				0	0	0			sda
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				0	0	0			sda
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam panti	Orang				1	1	24.157.650			sda
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			10.580	10.580			2.438.692.806		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan Permakanan	Orang				0	0	620.631.990			sda
2	Penyediaan Sandang	Orang				0	0	510.970.900			sda
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit				300	300	144.945.900			sda
4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang				3	3	510.531.670			sda
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang				7	7	651.612.346			sda

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam

- menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

6. Integrasi Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pembirisan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. *Ketaatan/compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Pemeriksaan/auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. *Laporan/accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?

6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. **Koordinasi**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. **Manajemen Kerja**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?

- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- 1) Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - 2) Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 - 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 - 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 - 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
 - 6) Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
 - 7) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
 - 8) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2. Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Provinsi Nusa Tenggara Barat berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Provinsi Nusa Tenggara Barat secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd

H. LALU GITA ARIADI